



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**  
**DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN**

<b>NOMOR SOP</b>	32.SOP/TL.05/DLT.5/2024
<b>TGL. PEMBUATAN</b>	19 Januari 2024
<b>TGL. REVISI</b>	-
<b>TGL. EFEKTIF</b>	1 Oktober 2023
<b>DISAHKAN OLEH</b>	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan,  Ditandatangani secara elektronik Ir. Mohamad Priharto Dwinugroho M.S.E. NIP. 196411151994031002
<b>NAMA SOP</b>	Penyiapan Surat Tugas Pemeriksaan Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

**Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014
4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kaulifikasi, Akreditasi dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
10. Keputusan Menteri ESDM Nomor 2339 K/20/MEM/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Dalam Pemberian Keputusan Perizinan di Bidang Ketenagalistrikan
11. Peraturan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 473 K/20/DJL.4/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan dalam Pemberian Keputusan Perizinan di Bidang Ketenagalistrikan
12. Peraturan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 556 K/20/DJL.1/2014 tentang Tata Cara Penomoran dan Registrasi Sertifikat Di Bidang Ketenagalistrikan
13. Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 682.K/OT.02/DJL.1/2022 tentang Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

**Keterkaitan :**

1. ESDM-04.02 DJK-02.06.03 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan
2. SOP Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan
3. SOP Verifikasi Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Subsektor Ketenagalistrikan bagi Pelayanan Publik yang Belum Terintegrasi Aplikasi SIMPONI
4. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar pada Aplikasi Nadine
5. SOP Pemberkasan Arsip di Unit Kerja/Unit Pengolah

**Peringatan :**

1. Apabila Penyiapan Surat Tugas Pemeriksaan Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka akan menghambat proses pemeriksaan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik

**Kualifikasi Pelaksana :**

1. Pendidikan minimal S1 Teknik Elektro / Teknik Mesin / Teknik Informatika / Hukum/ Ekonomi / Akuntansi
2. Memahami peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan
3. Memahami sistem manajemen mutu badan usaha jasa penunjang tenaga listrik
4. Memahami secara umum kegiatan di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik, termasuk aspek teknis dan administratif
5. Memahami sistem informasi dan pengelolaan database
6. Memahami proses sertifikasi ketenagalistrikan

**Peralatan/Perlengkapan :**

1. *Term of Reference*
2. Komputer/Printer
3. Jaringan Internet

**Pencatatan dan Pendataan :**

1. Surat Tugas Pemeriksaan Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik disimpan dalam database pada sistem informasi BUJPTL dan arsip manual.

## SOP Penyiapan Surat Tugas Pemeriksaan Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

No.	Aktifitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Tata Usaha	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan (Dirtek)	Inspektur Ketenagalistrikan / Analis Kebijakan Ahli Madya (Approval)	Inspektur Ketenagalistrikan / Analis Kebijakan Ahli Muda (Reviewer)	Petugas Pelayanan Publik (Prepare)	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menyiapkan konsep surat tugas pemeriksaan ke badan usaha jasa penunjang tenaga listrik						1. Lembar hasil verifikasi bukti pembayaran PNBPN	60 menit	1. Konsep surat tugas pemeriksaan badan usaha	1. SOP Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan
2	Memeriksa dan mengevaluasi konsep surat tugas pemeriksaan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik: 1. Jika setuju, meneruskan ke approval 2. Jika tidak setuju, mengembalikan kepada Prepare untuk diperbaiki						1. Konsep surat tugas pemeriksaan badan usaha	30 menit	1. Konsep surat tugas pemeriksaan badan usaha	
3	Memeriksa dan mengevaluasi konsep surat tugas pemeriksaan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik: 1. Jika setuju, meneruskan ke Dirtek 2. Jika tidak setuju, mengembalikan kepada Reviewer untuk diperbaiki						1. Konsep surat tugas pemeriksaan badan usaha	15 menit	1. Konsep surat tugas pemeriksaan badan usaha	
4	Memeriksa dan mengevaluasi konsep surat tugas pemeriksaan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik: 1. Jika setuju, membubuhkan tanda tangan elektronik dan mengirim surat melalui nadine 2. Jika tidak setuju, mengembalikan kepada Approval untuk diperbaiki						1. Konsep surat tugas pemeriksaan badan usaha	10 menit	1. Surat tugas pemeriksaan badan usaha	1. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar pada Aplikasi Nadine
5	Menyampaikan kepada tim pemeriksaan badan usaha dan mendokumentasikan surat tersebut dalam arsip						1. Surat tugas pemeriksaan badan usaha	10 menit	1. Arsip	1. SOP Pemberkasan Arsip di Unit Kerja/Unit Pengolah

